

Sinkronisasi Kurikulum Pendidikan Islam dengan Kurikulum Merdeka: Peluang dan Tantangan

Miswanto

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

Article Info

Keywords:

Synchronizing; Islamic Education Curriculum; Merdeka Curriculum; Opportunities; Challenges

ABSTRACT

This article explores the synchronization between the Islamic Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Islam/KPI) and the Merdeka Curriculum, a newly implemented national framework in Indonesia that emphasizes flexibility, character development, and student-centered learning. The study highlights that both curricula share common foundational values, particularly the alignment between Islamic principles such as faith, morality, justice, and social responsibility and the dimensions of the Pancasila Student Profile promoted in the Merdeka Curriculum. This alignment creates significant opportunities for integrating Islamic values into modern pedagogical practices, including differentiated instruction, project-based learning, and digital-based learning innovations. However, the process of synchronization faces several challenges. These include disparities in teacher competence, limited infrastructure, diverse interpretations of curriculum implementation, heavy administrative burdens, and gaps between theoretical ideals and practical classroom realities. These obstacles indicate the need for stronger teacher preparation, adequate learning resources, and supportive institutional policies. To address these issues, the article offers several strategic recommendations: continuous teacher training in designing Islamic value-based CP, ATP, and teaching modules; development of integrative learning models combining Islamic Education with project-based approaches; collaborative involvement between school, family, and community; provision of digital Islamic learning resources; and sustainable monitoring and evaluation by educational institutions. Overall, this article concludes that effective synchronization between KPI and the Merdeka Curriculum requires holistic planning, professional development, strong partnerships, and adaptable learning ecosystems. When implemented optimally, this integration has the potential to produce students who are religiously grounded, morally upright, intellectually competent, and capable of navigating global.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article history:

Received 10 16, 2025

Revised 10 24, 2025

Accepted 11 06, 2025

Corresponding Author:

Miswanto

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

Email: miswanto@stai-ibnusina-batam.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia terus mengalami dinamika sebagai respons terhadap tuntutan zaman yang semakin kompleks. Hadirnya Kurikulum Merdeka menjadi salah satu wujud reformasi pendidikan nasional yang menekankan fleksibilitas, diferensiasi pembelajaran, serta penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum ini menawarkan ruang kreativitas yang lebih luas bagi pendidik dalam merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, konteks sekolah, dan perkembangan teknologi. Dalam konteks pendidikan Islam, perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana kurikulum Pendidikan Islam yang sarat nilai spiritual, moral, dan akhlak dapat disinkronkan dengan Kurikulum Merdeka yang bersifat kompetensial dan adaptif?

Kurikulum Pendidikan Islam (KPI) secara historis memiliki orientasi pada pembentukan insan beriman dan berakhlak mulia sekaligus berpengetahuan. KPI menempatkan nilai-nilai tauhid, syariah, dan akhlak sebagai fondasi utama yang mengarahkan seluruh aktivitas pendidikan. Sementara itu, Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi guru untuk mengembangkan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar sesuai kondisi peserta didik. Kedua kurikulum ini, apabila dipahami secara mendalam, memiliki titik temu yang kuat, terutama pada aspek penguatan karakter, kemandirian, dan pengembangan kompetensi abad 21 seperti *critical thinking, creativity, collaboration, dan communication*.

Sinkronisasi antara kurikulum Pendidikan Islam dengan Kurikulum Merdeka menjadi penting karena pendidikan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan keagamaan. Dalam era globalisasi, arus informasi berjalan sangat cepat, menghadirkan tantangan besar bagi generasi muda dalam mempertahankan identitas moral dan spiritual. Oleh sebab itu, integrasi nilai-nilai Islam dalam Kurikulum Merdeka bukan hanya relevan, tetapi juga strategis untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter religius, humanis, dan moderat. Sinkronisasi ini menjadi peluang untuk menjadikan pembelajaran Pendidikan Islam lebih kontekstual, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Meskipun demikian, proses sinkronisasi tidak terlepas dari berbagai tantangan. Perbedaan paradigma antara kurikulum berbasis nilai dan kurikulum berbasis kompetensi dapat menimbulkan kesulitan dalam perumusan capaian pembelajaran. Selain itu, kompetensi guru dalam menyusun dan mengimplementasikan komponen-komponen Kurikulum Merdeka menjadi faktor kunci keberhasilan sinkronisasi tersebut. Tantangan lainnya mencakup keterbatasan sarana, beban administrasi, serta pemahaman yang belum merata di kalangan pendidik. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai peluang dan tantangan sinkronisasi ini menjadi penting sebagai landasan dalam merumuskan strategi implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

Kurikulum Pendidikan Islam (KPI) pada dasarnya merupakan seperangkat rencana, nilai, dan pengalaman belajar yang dirancang untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembinaan moral dan spiritual yang berkesinambungan. Oleh karena itu, KPI memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan kurikulum konvensional karena mencakup dimensi ruhani, sosial, dan intelektual secara terpadu.

Secara filosofis, KPI berakar pada tiga landasan utama. Pertama, landasan aqidah, yang menekankan tauhid sebagai inti seluruh aktivitas pendidikan. Kedua, landasan syariah, yang mengatur tata perilaku, ibadah, dan interaksi sosial peserta didik. Ketiga, landasan akhlak, yang menjadi tujuan akhir pendidikan Islam, yaitu membentuk pribadi yang mulia dan bermanfaat bagi umat. Ketiga dimensi ini kemudian terintegrasi dalam tujuan umum KPI, yaitu membentuk insan kamil manusia paripurna yang seimbang antara spiritualitas, intelektualitas, dan moralitas.

Karakteristik penting lain dari KPI adalah sifatnya yang holistik dan integratif. Pendidikan Islam tidak mengenal dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum; keduanya dianggap saling melengkapi dalam membentuk pemahaman yang utuh tentang kehidupan. Dengan demikian, kurikulum ini menekankan integrasi antara nilai-nilai Islam dengan berbagai disiplin ilmu seperti sains, teknologi, dan humaniora. Selain itu, KPI bersifat berkelanjutan, karena pendidikan dalam Islam dipandang sebagai proses sepanjang hayat (*long life education*).

Dalam praktiknya, KPI disusun melalui pendekatan yang menekankan keseimbangan antara teori dan praktik. Pembelajaran tidak hanya dilakukan secara kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik melalui kegiatan keagamaan, keteladanan guru, serta pembiasaan akhlak dalam

kehidupan sehari-hari di sekolah. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan kejujuran ditanamkan secara kontekstual agar peserta didik dapat menginternalisasikannya dalam perilakunya nyata.

Dengan karakteristik tersebut, KPI memiliki potensi besar untuk diselaraskan dengan Kurikulum Merdeka. Integrasi keduanya dapat menghasilkan pola pembelajaran yang tidak hanya adaptif dan kompetensial, tetapi juga berakar pada nilai moral dan spiritual Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan Literatur Riview, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan konsep kurikulum pendidikan Islam yang seimbang, yang dapat mengakomodasi kebutuhan intelektual dan spiritual peserta didik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Metode penunjang yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur, yang mengacu pada pengumpulan dan analisis berbagai referensi terkait kurikulum pendidikan Islam, sinkronisasi kurikulum Pendidikan Islam dan kurikulum Merdeka, peluang dan tantangan, serta pengembangan karakter dalam Pendidikan serta kurikulum merdeka. Buku-buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan dengan topik ini menjadi sumber utama untuk memahami konsep-konsep dasar pendidikan Islam, strategi kurikulum, serta pendekatan yang digunakan dalam pendidikan Islam di berbagai negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum Pendidikan Islam merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Secara konseptual, kurikulum dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai struktur akademik, tetapi juga sebagai wahana pembinaan moral dan spiritual. Karena itu, kurikulum Pendidikan Islam disusun berdasarkan prinsip integratif yang memadukan aspek aqidah, syariah, dan akhlak sebagai dasar utama pembentukan karakter peserta didik (Al-Syaibani, 1991). Konsep dasar kurikulum ini berlandaskan pandangan hidup Islam yang menempatkan pendidikan sebagai proses penyempurnaan manusia secara menyeluruh (insan kamil). Pendidikan dipandang tidak sekadar mentransfer pengetahuan, melainkan membentuk kepribadian yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal dalam kehidupannya (Arifin, 2013).

Tujuan kurikulum Pendidikan Islam mencakup pembentukan peserta didik agar memiliki keyakinan yang benar, menjalankan ibadah dengan baik, berperilaku etis, serta mampu memberikan kontribusi bagi kehidupan sosial. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam menekankan keseimbangan antara pengembangan akal, hati, dan perilaku. Secara normatif, tujuan ini merujuk pada perintah al-Qur'an dan hadis agar manusia belajar, berpikir, dan berakhlak mulia sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30) (Departemen Agama RI, 2014). Tujuan ini kemudian dikembangkan menjadi sasaran pembelajaran dalam berbagai aspek, yaitu aspek kognitif (pengetahuan keislaman), afektif (internalisasi nilai), dan psikomotorik (pengamalan ibadah dan akhlak mulia).

Kurikulum Pendidikan Islam memiliki karakteristik khas yang membedakannya dengan kurikulum umum. Pertama, kurikulum Islam bersifat berbasis nilai, di mana setiap proses pembelajaran selalu dikaitkan dengan prinsip tauhid sebagai dasar keimanan. Kedua, kurikulum Islam bersifat holistik, yaitu mencakup aspek rohani, intelektual, sosial, dan moral secara terpadu sehingga tidak terjadi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern (Langgulang,

2003). Ketiga, kurikulum ini bersifat fleksibel dan adaptif, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Keempat, pendidikan Islam memiliki karakter berorientasi akhlak, karena tujuan akhirnya adalah membentuk peserta didik yang memiliki kepribadian mulia dan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, kurikulum pendidikan Islam menekankan pendidikan sepanjang hayat, karena Islam memandang bahwa proses mencari ilmu dan membina diri berlangsung dari lahir hingga akhir hayat (Hamalik, 2016).

Dengan karakteristik tersebut, kurikulum Pendidikan Islam menjadi sistem pendidikan yang tidak hanya menekankan penguasaan materi, tetapi juga pembinaan karakter, spiritualitas, dan moralitas. Kurikulum ini menawarkan pendekatan yang harmonis antara nilai agama dan tuntutan modernitas, sehingga memiliki potensi yang besar untuk diselaraskan dengan Kurikulum Merdeka yang menekankan kompetensi, fleksibilitas, dan penguatan karakter. Keselarasan antara keduanya dapat menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global, namun tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman.

Karakteristik Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan yang dirumuskan untuk menjawab tantangan dunia modern yang semakin kompleks, cepat berubah, dan penuh ketidakpastian. Kurikulum ini dirancang agar pembelajaran menjadi lebih relevan, fleksibel, dan berpusat pada perkembangan peserta didik secara utuh. Secara khusus, karakteristik Kurikulum Merdeka dapat dipahami melalui tiga aspek utama: prinsip dasar, struktur kurikulum, dan orientasi pembelajaran yang ingin dicapai.

Pertama, prinsip utama Kurikulum Merdeka berpijak pada pemikiran bahwa pembelajaran harus memberikan ruang kebebasan, kreativitas, dan kemandirian kepada peserta didik serta guru. Prinsip merdeka belajar menekankan bahwa siswa memiliki kesempatan untuk belajar sesuai bakat, minat, dan kecepatannya masing-masing, sementara guru diberi kewenangan untuk mengembangkan strategi serta perangkat ajar yang paling sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan siswa. Selain itu, kurikulum ini mengedepankan prinsip diferensiasi pembelajaran, di mana setiap siswa diperlakukan sebagai individu unik dengan potensi yang berbeda-beda (Kemendikbud, 2022). Tidak hanya itu, Kurikulum Merdeka juga menegaskan pentingnya pembelajaran bermakna yang tidak sekadar mengejar penyelesaian materi, tetapi membangun kompetensi esensial seperti literasi, numerasi, karakter, serta keterampilan sosial-emosional. Prinsip berbasis proyek untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan salah satu ciri khas lain yang menonjol, karena memungkinkan siswa belajar secara kontekstual, kolaboratif, dan produktif.

Kedua, dari segi struktur kurikulum, Kurikulum Merdeka hadir dengan pendekatan yang lebih sederhana, fleksibel, dan adaptif. Struktur ini mencakup tiga komponen utama, yaitu mata pelajaran, proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), dan ketersediaan ruang fleksibilitas bagi sekolah. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, beban belajar tidak lagi dibagi secara sangat rinci per mata pelajaran, tetapi dalam bentuk jam pelajaran per tahun, sehingga sekolah dapat mengatur sendiri alokasi waktu sesuai kebutuhan. P5 menjadi bagian wajib dari struktur kurikulum, memberi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan karakter, kepedulian sosial, kebhinekaan, dan semangat keberlanjutan lingkungan. Bagi sekolah kejuruan, struktur juga menyediakan ruang bagi konsentrasi keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja (Direktorat GTK, 2022). Penyederhanaan capaian pembelajaran (CP) juga menjadi elemen krusial dalam struktur Kurikulum

Merdeka, karena memfokuskan pembelajaran pada kompetensi inti yang benar-benar dibutuhkan siswa.

Ketiga, orientasi Kurikulum Merdeka mengarah pada terbentuknya peserta didik yang berkarakter, adaptif, dan kompeten menghadapi perubahan zaman. Orientasi utamanya adalah membangun Profil Pelajar Pancasila, yang terdiri dari enam dimensi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebhinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif (Kemendikbudristek, 2021). Dengan orientasi tersebut, pembelajaran tidak hanya mengejar kognitif, tetapi secara integral mencakup aspek afektif dan psikomotorik. Selain itu, Kurikulum Merdeka berorientasi pada kebutuhan masa depan, seperti literasi digital, keterampilan kolaboratif, dan pemecahan masalah. Pendekatan pembelajaran yang memfasilitasi eksplorasi, penelitian sederhana, kreativitas, serta inovasi menjadi fokus utama. Dalam konteks ini, sekolah diberi ruang untuk menjadi ekosistem yang dinamis, kolaboratif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi maupun tuntutan masyarakat.

Secara keseluruhan, Kurikulum Merdeka dirancang untuk memerdekakan proses belajar, memperkuat karakter, serta membekali siswa dengan kompetensi yang relevan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Fleksibilitas struktur, kemerdekaan pedagogis, dan orientasi berbasis karakter menjadikan kurikulum ini sebuah langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia secara menyeluruh

Urgensi Sinkronisasi

Kurikulum Pendidikan Islam (KPI) memiliki peran strategis dalam mengembangkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual, kekuatan moral, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dalam konteks pendidikan nasional, KPI tidak dapat berdiri secara terpisah dari kerangka ideologis Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, salah satu tuntutan mendasar KPI adalah menghadirkan keselarasan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Pancasila. Keselarasan ini bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi merupakan kebutuhan filosofis yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia sebagai negara yang religius sekaligus plural. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, selaras dengan konsep tauhid dalam Islam yang menekankan pengakuan terhadap keesaan Allah dan pengabdian total kepada-Nya. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila juga sejalan dengan ajaran Islam tentang penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmat al-insān*) tanpa membedakan suku, ras, maupun agama (Al-Syaibani, 1991). Bahkan, nilai persatuan Indonesia memiliki korespondensi kuat dengan ajaran Islam tentang ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), sedangkan prinsip musyawarah dan keadilan dalam Pancasila merupakan bagian integral dari ajaran syariah. Dengan demikian, integrasi nilai Islam dan Pancasila dalam KPI bukanlah proses pemaksaan, tetapi merupakan proses harmonisasi dua sistem nilai yang sama-sama bertujuan membentuk manusia yang berkarakter, beradab, dan bertanggung jawab.

Keselarasan ini semakin penting karena KPI harus mampu mewujudkan pendidikan Islam yang modern dan adaptif. Dalam era yang ditandai oleh perubahan cepat, kompleksitas masalah sosial, dan kemajuan teknologi, pendidikan Islam tidak lagi dapat dibatasi pada pengajaran normatif dan ritual, tetapi harus berkembang menjadi kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Modernisasi KPI tidak berarti mengubah esensi ajaran Islam, melainkan menyajikan ajaran tersebut dengan pendekatan, metode, dan media yang lebih kontekstual dan relevan. Pendidikan Islam harus mampu melahirkan peserta didik yang kreatif, inovatif, komunikatif, serta mampu memecahkan masalah. Literasi digital, keterampilan berpikir kritis, kemampuan kolaboratif, serta pemahaman terhadap isu global harus menjadi bagian dari pembelajaran pendidikan Islam (Arifin, 2013).

Kurikulum yang adaptif juga memberi ruang bagi guru untuk mengembangkan model pembelajaran berbasis proyek, pendekatan saintifik, atau pembelajaran berbasis masalah, sehingga siswa tidak hanya memahami ajaran Islam secara teoritis, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Modernitas dalam KPI berarti menghadirkan nilai-nilai Islam sebagai solusi, bukan sebagai warisan statis yang terlepas dari realitas sosial.

Salah satu tantangan besar yang harus diatasi melalui pengembangan KPI adalah persoalan dikotomi ilmu antara ilmu agama dan ilmu umum. Dikotomi ini merupakan warisan kolonialisme dan sistem pendidikan sekuler yang memisahkan aspek spiritual dari aspek intelektual. Padahal, dalam Islam, semua ilmu pada hakikatnya berasal dari Allah, baik ilmu yang diwahyukan (al-'ulūm al-naqliyah) maupun ilmu yang diperoleh melalui akal dan pengalaman (al-'ulūm al-'aqliyah) (Langgulong, 2003). Pandangan integratif ini mendorong KPI untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam semua mata pelajaran, bukan hanya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Misalnya, dalam pembelajaran sains, peserta didik dapat diajak merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam fenomena alam; dalam matematika, siswa dapat dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab dan ketelitian; dan dalam ilmu sosial, siswa dilatih memahami etika interaksi, keadilan, dan kesetaraan. Dengan demikian, KPI berperan menghapus sekat buatan antara ilmu agama dan ilmu umum sehingga terbentuk pemahaman yang utuh dan seimbang. Integrasi ilmu juga diperlukan agar siswa tidak melihat agama sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan modern, melainkan melihatnya sebagai sumber nilai yang membimbing perkembangan ilmu pengetahuan.

Selain persoalan filosofis dan pedagogis tersebut, KPI juga dihadapkan pada tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, serta kemerosotan moralitas di kalangan peserta didik. Globalisasi membawa arus budaya asing, gaya hidup instan, konsumerisme, individualisme, dan pengaruh media digital yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam kondisi demikian, KPI harus berfungsi sebagai benteng moral yang memperkuat karakter peserta didik. Pendidikan Islam harus mampu membekali siswa dengan kemampuan literasi digital agar mereka mampu menyeleksi informasi, menghindari hoaks, dan tidak terjebak dalam konten negatif yang dapat merusak moralitas maupun akhlak. Tantangan terbesar pendidikan modern adalah bagaimana peserta didik dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana produktif, bukan sebagai alat yang merusak akhlaknya (Hamalik, 2016). Oleh karena itu, KPI perlu memberikan pembinaan akhlak dan spiritualitas yang lebih kuat, bukan melalui ceramah semata, tetapi melalui keteladanan, pembiasaan, dan pengalaman keagamaan yang menyentuh hati.

Di era globalisasi, moralitas peserta didik semakin rentan terhadap pengaruh eksternal, seperti pergaulan bebas, kecanduan gadget, kekerasan digital, serta penurunan rasa hormat terhadap orang tua dan guru. Situasi ini menuntut KPI untuk menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Peserta didik perlu dibimbing agar mampu menginternalisasi nilai-nilai akhlak mulia seperti disiplin, kejujuran, kesederhanaan, empati, dan tanggung jawab. Kurikulum harus mengoptimalkan kegiatan yang membentuk karakter, seperti kegiatan keagamaan, pembiasaan ibadah, dakwah kreatif, mentoring keagamaan, serta kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pendidikan Islam dapat menghasilkan peserta didik yang mampu menghadapi dinamika modern tanpa kehilangan akar spiritual dan moralitasnya.

Secara keseluruhan, keempat aspek tersebut-keselarasan nilai Islam dan Pancasila, modernisasi pendidikan Islam, integrasi ilmu, dan respons terhadap globalisasi merupakan fondasi strategis bagi pengembangan KPI yang relevan, kontekstual, dan berdaya saing tinggi. KPI yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya akan melahirkan generasi yang harmonis antara iman dan ilmu, spiritualitas dan intelektualitas, serta lokalitas dan globalitas. Inilah

generasi yang diharapkan mampu menjadi insan kamil sekaligus pelajar Pancasila yang berkarakter, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi dalam kehidupan masyarakat modern

Peluang Sinkronisasi

Sinkronisasi antara Kurikulum Pendidikan Islam (KPI) dan Kurikulum Merdeka membuka peluang besar bagi pembelajaran yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga kuat secara spiritual dan karakter. Keselarasan ini dapat memperkuat peran pendidikan Islam dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, kritis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pertama, terdapat peluang besar pada kesesuaian antara nilai Islam dan Profil Pelajar Pancasila. Enam dimensi Profil Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebhinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif dalam banyak hal selaras dengan prinsip-prinsip utama pendidikan Islam. Ajaran Islam telah menekankan pentingnya keimanan, akhlak, persaudaraan, kerja sama (ta'awun), kemandirian, serta pengembangan akal sebagai amanah ilahi (QS. Al-Mujādilah: 11). Selaras, Kurikulum Merdeka juga mengutamakan pembentukan karakter yang berintegritas dan humanis (Kemendikbudristek, 2021). Dengan demikian, KPI dapat dengan mudah menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan sosial ke dalam pembelajaran berbasis proyek (P5), menjadikannya sarana efektif membentuk profil pelajar muslim yang berkepribadian luhur sekaligus pancasilais.

Kedua, Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada guru dalam merancang pembelajaran, sebuah peluang strategis untuk memperkuat pembelajaran Pendidikan Islam. Guru PAI dapat memilih metode, media, serta bahan ajar sesuai kebutuhan peserta didik. Mereka dapat mengintegrasikan pendekatan andragogi, differentiated instruction, hingga project based learning untuk meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan siswa (Direktorat GTK, 2022). Ruang kreatif ini sangat mendukung karakter Pendidikan Islam yang menekankan internalisasi nilai melalui keteladanan, pembiasaan, diskusi reflektif, dan kontekstualisasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, fleksibilitas kurikulum menjadi peluang besar lainnya. Struktur Kurikulum Merdeka yang berbasis alokasi jam per tahun memberi ruang bagi sekolah untuk mengatur jadwal, intensitas, dan kedalaman materi PAI sesuai konteks masing-masing. Fleksibilitas ini memungkinkan integrasi antara PAI dan mata pelajaran umum dalam kegiatan proyek, seperti proyek sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan demikian, KPI dapat menghindari dikotomi ilmu karena pembelajaran nilai-nilai Islam dapat dipadukan dengan literasi, sains, kreativitas, maupun teknologi.

Keempat, Kurikulum Merdeka sangat menekankan penguatan pendidikan karakter, sebuah peluang yang sangat relevan dengan tujuan utama KPI. Melalui kegiatan P5 dan pembelajaran tematik, nilai-nilai Islam seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, empati, serta kepedulian terhadap lingkungan dapat terinternalisasi secara lebih mendalam. Pendidikan karakter berbasis Islam dapat diformulasikan ulang agar selaras dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila, sehingga menghasilkan pembelajaran komprehensif yang menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Kelima, sinkronisasi kurikulum juga membuka peluang dalam integrasi teknologi. Kurikulum Merdeka mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran, evaluasi, dan kolaborasi. Hal ini sejalan dengan kebutuhan KPI untuk menghadirkan pendidikan Islam yang modern, adaptif, dan mampu menjawab tantangan era digital (Zed, 2022). Guru PAI dapat memanfaatkan aplikasi digital, video dakwah edukatif, platform e-learning, hingga media interaktif untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Integrasi teknologi juga memungkinkan internalisasi nilai Islam melalui konten digital yang kreatif dan kontekstual.

Secara keseluruhan, peluang sinkronisasi ini tidak hanya memperkuat efektivitas pendidikan Islam, tetapi juga menjadikannya lebih relevan, modern, dan berakar pada nilai kebangsaan.

Tantangan Sinkronisasi

Sinkronisasi antara Kurikulum Pendidikan Islam (KPI) dan Kurikulum Merdeka, meskipun menjanjikan peluang besar, tetap dihadapkan pada beragam tantangan yang perlu dicermati secara serius. Salah satu tantangan utama adalah kompetensi guru. Guru Pendidikan Agama Islam tidak hanya dituntut menguasai materi keagamaan, tetapi juga harus mampu menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada diferensiasi, proyek, penggunaan teknologi, dan asesmen formatif. Banyak guru PAI masih kesulitan memahami capaian pembelajaran (CP), merancang modul ajar, serta mengintegrasikan nilai Islam ke dalam proyek P5 dengan pendekatan kreatif (Azhar, 2022). Kesenjangan kompetensi ini membuat proses sinkronisasi tidak selalu berjalan optimal.

Tantangan kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana, terutama bagi sekolah di daerah terpencil. Kurikulum Merdeka menuntut pemanfaatan teknologi digital, ruang belajar fleksibel, media pembelajaran variatif, hingga fasilitas untuk proyek-proyek tematik. Namun kenyataannya, tidak semua sekolah memiliki akses internet memadai, perangkat teknologi, atau ruang belajar yang mendukung pembelajaran aktif (BPS, 2021). Ketimpangan fasilitas ini menyebabkan implementasi Kurikulum Merdeka menjadi timpang, termasuk dalam pembelajaran PAI yang seringkali membutuhkan media kreatif untuk menanamkan nilai Islam secara kontekstual.

Tantangan berikutnya adalah pemahaman yang beragam di kalangan guru maupun pemangku kebijakan sekolah. Sebagian berpandangan bahwa Kurikulum Merdeka hanya perubahan teknis, sementara sebagian lainnya menganggapnya perubahan radikal sehingga kebingungan dalam penerapannya. Dalam konteks Pendidikan Islam, guru juga memiliki pemahaman yang berbeda mengenai bagaimana nilai-nilai Islam harus diintegrasikan dengan pendekatan pedagogik modern. Perbedaan pemahaman mengenai konsep merdeka belajar, CP, P5, hingga asesmen diagnostik membuat implementasi sinkronisasi tidak seragam dan berpotensi melahirkan bias atau penyimpangan dari tujuan kurikulum (Wijayanti, 2023).

Selain itu, guru dan sekolah juga menghadapi tantangan besar terkait waktu dan beban administrasi. Guru PAI harus melaksanakan pembelajaran, mengembangkan modul ajar, melakukan asesmen berkelanjutan, melaksanakan proyek P5, sekaligus memenuhi dokumen administrasi lainnya. Beban administratif yang tinggi sering membuat guru kelelahan dan kehilangan fokus pada implementasi pembelajaran bermakna. Kurangnya pendampingan sistematis membuat guru harus belajar mandiri, sehingga proses adaptasi terasa lebih berat (Direktorat GTK, 2022). Dalam kondisi seperti ini, sinkronisasi antara KPI dan Kurikulum Merdeka sering kali hanya berjalan di tingkat dokumen, bukan dalam pembelajaran nyata.

Tantangan terakhir adalah kesenjangan antara ideal dan praktik lapangan. Secara teoritis, Kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas, kreativitas, dan pembelajaran kontekstual. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian sekolah masih menjalankan pembelajaran secara tradisional, berpusat pada guru, dan minim kegiatan proyek. Dalam PAI, idealnya siswa diajak memahami dan menginternalisasi ajaran Islam melalui pengalaman langsung, diskusi reflektif, dan proyek berbasis nilai. Namun keterbatasan waktu, budaya sekolah yang belum mendukung, dan beban kurikulum lainnya sering membuat pembelajaran PAI tetap bersifat ceramah dan berorientasi kognitif. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan sinkronisasi membutuhkan perubahan paradigma pedagogik, bukan sekadar perubahan dokumen kurikulum.

Melihat berbagai tantangan tersebut, proses sinkronisasi membutuhkan penguatan SDM, sarana yang memadai, pemahaman yang komprehensif, manajemen waktu yang efektif, serta komitmen bersama untuk menjembatani kesenjangan antara ideal kurikulum dan praktik pembelajaran di lapangan.

Strategi dan Rekomendasi Sinkronisasi

Upaya sinkronisasi antara Kurikulum Pendidikan Islam (KPI) dan Kurikulum Merdeka memerlukan strategi komprehensif yang tidak hanya menasar peningkatan kompetensi guru, tetapi juga penguatan ekosistem pendidikan secara menyeluruh. Strategi pertama yang perlu dilakukan adalah pelatihan guru terkait penyusunan Capaian Pembelajaran (CP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan modul ajar berbasis nilai Islam. Guru PAI harus dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai struktur kurikulum baru, pendekatan pedagogis yang relevan, serta cara mengintegrasikan nilai tauhid, akhlak, dan fikih ke dalam pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif. Pelatihan ini harus bersifat berkelanjutan, tidak hanya satu kali kegiatan, dan melibatkan pendampingan oleh instruktur berpengalaman. Dengan demikian, guru tidak hanya memahami teknis penyusunan perangkat pembelajaran, tetapi juga mampu mentransformasikan nilai Islam ke dalam aktivitas pembelajaran modern seperti *differentiated instruction* dan *project based learning* (Mulyasa, 2022).

Strategi kedua, yaitu pengembangan model pembelajaran integratif yang memadukan Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan pendekatan *project based learning* (PjBL). Model pembelajaran integratif memungkinkan peserta didik menginternalisasi ajaran Islam melalui proyek nyata, seperti kegiatan kewirausahaan berbasis etika Islam, proyek lingkungan hidup sebagai implementasi konsep khalifah fil ardh, atau kegiatan sosial yang mencerminkan nilai solidaritas dan ukhuwah. Pengintegrasian PAI dengan PjBL tidak hanya membuat pembelajaran lebih bermakna, tetapi juga memberi kesempatan bagi siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai keislaman secara langsung. Model ini selaras dengan prinsip Kurikulum Merdeka yang menekankan pengalaman belajar autentik, kolaborasi, dan pembentukan karakter (Hosnan, 2020).

Ketiga adalah kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, yang merupakan pilar penting pendidikan holistik. Sinkronisasi kurikulum tidak akan berhasil tanpa dukungan lingkungan belajar yang konsisten antara sekolah dan rumah. Orang tua perlu dilibatkan dalam program pembiasaan keagamaan, monitoring perkembangan moral anak, serta kegiatan P5 berbasis keagamaan. Sementara itu, masyarakat dapat berperan sebagai mitra melalui kegiatan keagamaan, komunitas literasi Islam, atau program sosial yang memperkuat nilai-nilai Islam. Kolaborasi tripusat pendidikan ini sejalan dengan konsep pendidikan Islam yang memandang keluarga dan lingkungan sebagai bagian integral dari proses pembinaan akhlak dan iman (Suyadi, 2019).

Strategi keempat adalah penyediaan sumber belajar digital berbasis kurikulum Islam. Di era digital, peserta didik cenderung lebih responsif terhadap media interaktif seperti video, infografis, modul digital, aplikasi pembelajaran, dan platform e-learning. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu mengembangkan sumber belajar digital yang relevan dengan kurikulum PAI, seperti modul tafsir tematik, simulasi ibadah, atau konten video tentang sejarah Islam yang dikontekstualisasikan dengan kehidupan modern. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya sejalan dengan Kurikulum Merdeka yang berbasis literasi digital, tetapi juga memberikan solusi atas kebutuhan sumber belajar yang variatif dan menarik bagi siswa (Zed, 2022).

Strategi terakhir adalah monitoring dan evaluasi berkelanjutan oleh lembaga pendidikan. Keberhasilan sinkronisasi kurikulum tidak dapat diukur secara instan, tetapi memerlukan penilaian berkelanjutan terkait efektivitas pembelajaran, kesiapan guru, ketercapaian CP, dan dampak terhadap karakter siswa. Monitoring dapat dilakukan melalui supervisi akademik, forum refleksi

guru, laporan proyek P5, serta evaluasi berbasis data pada capaian siswa. Evaluasi ini memungkinkan sekolah melakukan perbaikan berkelanjutan dan menyesuaikan strategi dengan kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, monitoring yang baik memastikan bahwa nilai Islam benar-benar terintegrasi ke dalam pembelajaran, bukan sekadar tertera dalam dokumen kurikulum (Direktorat GTK, 2022).

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten, sinkronisasi Kurikulum Pendidikan Islam dan Kurikulum Merdeka akan berjalan lebih efektif, adaptif, dan berdampak nyata pada pembentukan peserta didik yang beriman, berakhlak, dan kompeten menghadapi tantangan zaman.

KESIMPULAN

Sinkronisasi antara Kurikulum Pendidikan Islam (KPI) dan Kurikulum Merdeka merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman sekaligus berakar pada nilai-nilai spiritual dan karakter bangsa. Harmonisasi ini semakin memungkinkan karena nilai dasar Islam tentang keimanan, akhlak, keadilan, dan tanggung jawab selaras dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila yang menekankan ketakwaan, kemandirian, gotong royong, kreativitas, dan nalar kritis. Peluang besar muncul dari fleksibilitas Kurikulum Merdeka, keleluasaan guru dalam berinovasi, penguatan karakter, serta ruang integrasi teknologi yang dapat memperkaya proses pembelajaran Pendidikan Islam.

Namun demikian, sinkronisasi ini tidak lepas dari tantangan nyata. Kesenjangan kompetensi guru, keterbatasan sarana prasarana, pemahaman yang tidak seragam, beban administrasi, hingga disparitas antara ideal kurikulum dan praktik lapangan menjadi hambatan yang perlu diatasi secara sistematis. Tanpa kesiapan sumber daya manusia dan dukungan lingkungan belajar yang memadai, sinkronisasi berisiko hanya berhenti pada tataran dokumen.

Karena itu, strategi penguatan sangat diperlukan. Pelatihan guru dalam penyusunan perangkat ajar berbasis nilai Islam, pengembangan model pembelajaran integratif seperti PAI–PjBL, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, penyediaan sumber belajar digital, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Pendekatan strategis ini memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya mencapai kompetensi akademik, tetapi juga membentuk karakter dan spiritualitas peserta didik secara utuh.

Dengan implementasi yang terstruktur, dukungan semua pihak, dan pemahaman mendalam terhadap esensi kedua kurikulum, sinkronisasi KPI dan Kurikulum Merdeka dapat menjadi fondasi kuat dalam membentuk generasi yang religius, berakhlak, cerdas, kreatif, serta siap menghadapi tantangan global.

REFERENSI

- Al-Syaibani, Omar Mohammad Al-Toumy. Falsafah Pendidikan Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Arifin, M. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Azhar, M. Kompetensi Guru PAI di Era Kurikulum Merdeka. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Pendidikan Indonesia 2021. Jakarta: BPS, 2021.
- Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Depag RI, 2014.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Direktorat GTK. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Merdeka. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2022.



- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan. Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka. Jakarta: Kemendikbud, 2022.
- Hamalik, Oemar. Manajemen Kurikulum. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Kemendikbud. Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka. Jakarta: Kemendikbud, 2022.
- Kemendikbudristek. Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, 2021.
- Langgulang, Hasan. Asas-Asas Pendidikan Islam. Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2003.
- Wijayanti, R. Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah: Peluang dan Tantangan. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Zed, Mestika. Pendidikan Islam di Era Digital. Jakarta: Rajawali Pers, 2022..